

**KAPASITAS EKONOMI MASYARAKAT PETANI KORBAN GUSURAN PT
BNIL TULANG BAWANG DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE*
*LIVELIHOOD***

Anita Damayantie¹, Ikram², Usman Raidar³, Handi Mulyaningsih⁴

¹⁾ *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

²⁾ *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

³⁾ *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

⁴⁾ *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

ABSTRAK

Penelitian ini hendak menggambarkan kondisi sosial-ekonomi komunitas petani korban gusuran PT BNIL di Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Penelitian dilakukan dengan kerangka pemikiran ekonomi politik agraria dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian akan dilakukan pada sample satu desa yang penduduknya korban gusuran PT BNIL serta menjadi pusat pengorganisasian serikat petani yakni desa Bujuk Agung. Kajian akademik dan laporan jurnalistik tentang konflik agraria yang melibatkan petani Tulang Bawang dan PT BNIL sudah banyak dihasilkan namun hampir seluruhnya membahas aspek konflik. Catatan rinci tentang kondisi sosial-ekonomi apalagi struktur agraria komunitas petani yang berkonflik itu belum tersedia. Padahal, tanpa adanya gambaran rinci tentang kondisi sosial-ekonomi komunitas petani tergusur, sulit untuk mengetahui seperti apa konsekuensi dari dan bagaimana proses penggusuran berdampak pada komunitas petani setempat. Informasi rinci tentang kondisi sosial-ekonomi juga dapat digunakan dalam konteks penguatan kelembagaan organisasi petani untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria dari “bawah” yang didorong oleh rakyat. Penelitian ini akan menghasilkan laporan tentang kondisi sosial-ekonomi sebagai dasar informasi guna menggambarkan stuktur agraria di wilayah konflik di Tulang Bawang.

Kata kunci: kondisi sosial-ekonomi, petani, sustainable livelihood

ABSTRACT

This study intends to describe the socio-economic conditions of the community of farmers who were evicted by PT BNIL in Banjar Margo District, Tulang Bawang Regency, Lampung. The research was conducted with an agrarian political economy framework and a qualitative research approach. The research will be carried out in a sample of one village whose residents are victims of PT BNIL's eviction as well as being the center for organizing a farmer union, namely the village of Bujuk Agung. Many academic studies and journalistic reports on agrarian conflicts involving Tulang Bawang farmers and PT BNIL have been produced, but almost all of them discuss aspects of the conflict. Detailed records regarding the socio-economic conditions, especially the agrarian structure of the conflicting farming communities, are not yet available. In fact, without a detailed description of the socio-economic conditions of the evicted farming communities, it is difficult to know what the consequences will be and how the eviction process will affect local farming communities. Detailed information on socio-economic conditions can also be used in the context of institutional strengthening of farmer organizations to support the implementation of agrarian reform from “below” which is driven by the people. This research will produce a report on

socio-economic conditions as a basis for information to describe the agrarian structure in the conflict area in Tulang Bawang.

Keywords: *socio-economic conditions, agriculture, sustainable livelihood*

PENDAHULUAN

Dalam konteks perubahan masyarakat yang didorong oleh proses kapitalisasi, terdapat reaksi atau respon yang berbeda-beda dari tiap komunitas petani di berbagai tempat. Satu faktor penting yang dihadapi komunitas tani di berbagai tempat dalam proses tersebut yakni berkenaan dengan perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan. Kaum tani, bagaimanapun, memiliki tingkat ketergantungan utama terhadap tanah (Wolf, 1966). Dalam konteks perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan, atau lebih tepatnya proses perampasan tanah yang eskalasinya meningkat pascakrisis ekonomi 2008, Hall dkk. (2015) memetakan terdapat tiga reaksi politik “dari bawah” atas proses tersebut. Perampasan lahan tidak hanya menimbulkan (1) reaksi perlawanan atas itu, tapi juga (2) tiadanya perlawanan, atau bahkan (3) pengintegrasian komunitas yang dirampas lahannya ke dalam skema produksi yang dijalankan atas dasar perampasan lahan itu. Di sini, penting untuk memerhatikan aspek-aspek kelas, gender, generasi, etnisitas, nasionalisme serta berbagai ekspektasi, aspirasi, dan tradisi perjuang yang eksis secara historis-spesifik ketika perampasan lahan terjadi dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok sosial yang terlibat di dalamnya.

Melihat keadaan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah dengan angka konflik agraria yang cukup tinggi—terkait fenomena perampasan lahan—yang pada gilirannya memunculkan berbagai reaksi politik dari kaum tani, kami memandang perlu untuk menggali satu aspek yang belum banyak disoroti dari berbagai kajian atas politik petani di Lampung. Yakni dengan menyoroti aspek dinamika internal dari komunitas petani: kondisi sosial-ekonominya.

Aspek dinamika internal dari komunitas ataupun kelompok petani menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena akan berbeda di setiap daerah. Beberapa penelitian telah menjabarkan durasi dan rentetan peristiwa yang terjadi dalam konflik agraria.

Sayangnya, masih minim yang membahas tentang strategi bertahan hidup dari masyarakat ini. Hal ini akan semakin menarik apabila penelitian ini mengkaji potensi yang dimiliki komunitas ini serta kapasitas dari setiap elemen yang dimilikinya.

Subjek kajian yang dipilih untuk menerapkan analisis atas hal tersebut yakni komunitas petani korban gusuran PT BNIL di desa Bujuk Agung, kecamatan Margo Agung, kab. Tulang Bawang. Komunitas ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (a) komunitas petani Bujuk Agung telah mengalami proses perampasan serta sengketa lahan berpuluh tahun yang memunculkan reaksi politik “dari bawah” yang saat ini terwakili melalui organisasi Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB). Artinya, pengalaman panjang politik petani Bujuk Agung dalam upaya memperoleh hak atas tanah yang telah berlangsung tiga dekade telah memenuhi kriteria politik petani yang akan dianalisis; (b) belum ada studi yang mencoba untuk menganalisis struktur agraris komunitas petani Bujuk Agung serta menghubungkannya dengan aspek politik petani.

TINJAUAN PUSTAKA

Kaum tani itu tidak homogen, melainkan terbagi dalam golongan-golongan yang sebagian besar ditentukan oleh penguasaan atas sarana produksi atau *kontrol atas sumber daya produksi*. Beda-beda golongan ini terpaut satu sama lain dalam relasi-relasi produksi pada konteks pembangunan relasi-relasi komoditi dalam ekonomi pedesaan. Apa yang patut diperhatikan adalah relasi diantara golongan-golongan di dalam kaum tani itu sendiri (*intra-peasants*), antara kaum tani dengan kaum non-petani, termasuk dengan yang bukan bagian dari komunitas pedesaan (*extrarural groups*). Sebagaimana dicatat White (2018a: 2) “*changing kinds of relations between them (or between peasants and nonpeasants, including extrarural groups) in the context of the development of commodity relations in rural economy*”.

Bernstein (2015) memandang bahwa “sebagai hasil dari diferensiasi kelas, “petani” atau “petani keluarga” tidak dapat dilihat sebagai satu “kelas”, melainkan terpilah menjadi kelas-kelas petani kapitalis skala kecil, produsen komoditas skala kecil yang relatif sukses, dan buruh tani. Seperti juga diuraikan oleh White,

diferensiasi kelas adalah proses penggolongan petani ke dalam beberapa kelas. Dari pengalaman kolonial di Asia dan Afrika, Bernstein mencatat bahwa begitu komodifikasi terjadi timbul kecenderungan diferensiasi. Artinya, diferensiasi diawali dengan proses komodifikasi subsistensi. Perbedaan uraian Bernstein dengan White tentang diferensiasi terletak pada penjelasan syarat dimulainya proses diferensiasi yakni pertama-tama petani kecil dalam upaya subsistensinya terikat pada pasar; upaya subsistensinya itu tidak bisa berlangsung di luar relasi-relasi komoditas.

Prinsip dari diferensiasi kelas itu juga berangkat dari kategori kapital dan tenaga-kerja. Dari uraian Bernstein, ada dua hal yang penting untuk disoroti yakni 1) soal *kontradiksi* (dalam relasi kapital dan tenaga kerja), maksudnya dalam relasi antara kapital dan tenaga-kerja, serta 2) bentuk *reproduksi*. Dalam proses diferensiasi, nampaknya penggolongan petani sejalan dengan sejauh mana posisi mereka dalam hubungan kontradiktif antara kapital dan tenaga-kerja. Bernstein menyebutkan kalau “*kaum petani miskin mengalami kontradiksi paling tajam pada usaha mereproduksi diri mereka sebagai tenaga-kerja dan kapital...*” (Bernstein, 2015: 123).

Dari kutipan itu kita melihat bahwa pada kategori petani miskin, karakter dasarnya ialah ia pemilik kapital sekaligus tenaga-kerja. Darimana kita ketahui hal ini? Kita bisa mengetahui dari apa yang mereka miliki (tanah, alat produksi) dan apa yang mereka lakukan dalam usaha tani mereka (sebagai tenaga-kerja). Singkat kata, ya pemilik sarana produksi, ya juga pekerjanya. Tak heran jika Bernstein, sebagaimana sering juga disebut oleh sarjana lain (Chayanov atau Scott, misalnya), memandang bahwa diantara kelompok lain merekalah yang paling keras bekerja dan paham menderita (lihat kutipan Chayanov, hal. 124).

Diferensiasi melibatkan proses perubahan yang bersifat kumulatif dan permanen dalam cara-cara beragam kelompok di masyarakat pedesaan—serta sebagian di luarnya—memperoleh akses atas produk dari tenaga-kerja mereka sendiri atau orang lain, didasarkan pada perbedaan-perbedaan kontrol mereka atas sumber daya produksi dan seringkali, tapi tidak selalu, berkenaan dengan peningkatan ketidaksetaraan akses atas tanah. Fokus dari investigasi atas perubahan hubungan-hubungan tersebut yakni mekanisme perpindahan/transfer atau ekstraksi surplus yang

berlangsung secara umum di ekonomi pedesaan, sebagaimana bisa dilihat dari kajian-kajian yang dilakukan para penulis dengan perspektif teoritis yang berbeda, namun tetap mempertimbangkan hubungan-hubungan ini sebagai variabel determinan yang fundamental dalam struktur agraria (White, 1992: 20).

METODE

Penelitian akan menggunakan paradigma ekonomi-politik agraria dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan dioperasionalkan melalui konsep struktur agraris dan diferensiasi sosial. Hubungan diantara kedua konsep ini adalah: pemerian atas struktur agraris merupakan landasan untuk membaca proses diferensiasi sosial.

Penelitian ini berlokasi di desa Bujuk Agung, kecamatan Banjar Margo, kabupaten Tulang Bawang dengan subjek penelitian yakni komunitas petani di desa tersebut. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari *sample* rumah tangga petani sesuai kategori penguasaan lahan (*snowball method*), informan kunci (*snowball method*), dan dokumen profil sosial-ekonomi di desa, kecamatan, kabupaten. Analisis menggunakan dua konsep tersebut dapat dilakukan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan melalui telaah data statistik, pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Sustainable Livelihood Framework* Kelompok Petani**

Konsep tentang *Sustainable livelihood framework* (SLF) mengacu pada kapasitas yang dimiliki masyarakat. Tentu saja setiap kapasitas ini dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Ada beberapa tingkatan dalam SLF ini, antara lain kerentanan sosial, pemetaan aset, transformasi dalam perubahan, penetapan strategi

sosial dan *livelihood outcome*. Tiap-tiap tingkatan ini melibatkan semua elemen yang ada (material dan non material) dan menjadikan masyarakat sebagai pusatnya.

Dalam perspektif SLF, pemetaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dilakukan. Namun ini menjadi salah satu cara, bukan satu-satunya. Untuk memetakan potensi sosial masih perlu dukungan unsur lain. Unsur tersebut adalah modifikasi atau interferensi sosial dan adaptasi sosial. Memodifikasi masyarakat dapat dilakukan untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu kelompok sosial. Sedangkan adaptasi masyarakat perlu dilakukan untuk menyeimbangkan elemen-elemen yang dimiliki agar dapat selaras antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, masih perlu disesuaikan dengan situasi setempat untuk memahami karakter wilayah dan kemudian ditentukan prioritas lokalnya agar dapat menjadi ciri khas yang istimewa apabila dibandingkan dengan daerah lain.

Pemetaan Kerentanan Kelompok Petani

Kerentanan sosial menjadi tingkatan awal dalam SLF ini. Konflik yang dialami oleh petani yang tergusur oleh PT. BNIL ini memang sudah lama terjadi dan belum menemukan solusi yang tepat. Boleh dikatakan bahwa kondisi yang sedang dialami adalah stagnasi resolusi konflik. Konflik yang terjadi sekian lama membuat kelompok petani ini menjadi rentan terhadap segala macam perubahan kondisi sosial yang terjadi. Perubahan situasi, meskipun kecil, dapat menjadi kejutan tersendiri bagi kelompok ini karena kerentanan sosial yang dimiliki.

Dalam masa yang stagnan ini, kelompok petani bukan tidak menderita. Penderitaan petani yang tergusur ini justru terus mengalami akumulasi. Masalah lama belum terselesaikan, namun masalah baru serta masalah turunan terus berdatangan. Di sisi lain, kebutuhan hidup masyarakat tidak dapat diabaikan dan tidak cukup terpenuhi dengan baik. Hal ini menjadikan kelompok petani semakin rentan.

Konflik agraria memang bukan isu yang baru di Lampung. Konflik ini tidak kunjung selesai karena pihak-pihak yang berkuasa mempunyai kapasitas yang besar dalam mengolah isu. Seperti yang terjadi di kabupaten Tulang Bawang ini. Kelompok petani dieksploitasi dan juga ditipu agar tunduk kepada para penguasa. Berbagai macam kekerasan telah diterima kelompok petani ini sejak tahun 1986. Kekerasan

tersebut antara lain pengusiran, pemaksaan, penipuan, penyiksaan, kerusuhan, dan kriminalisasi oleh pihak yang berkuasa (Matanasi, 2017).

Masyarakat petani yang menjadi korban gusuran PT. BNIL ini tinggal di Desa Bujuk Agung dan Agung Jaya. Penduduk di kedua desa ini berasal dari tujuh desa yang berbeda. Kondisi masyarakat di desa-desa tersebut mayoritas berada dalam kemiskinan. Setiap masyarakat di desa ini rata-rata memiliki tanah 1 hektar. Tanah tersebut biasanya dibagi menjadi tanah pekarangan dan perladangan. Tanah pekarangan biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk mengolah tanah menjadi batu bata. Sedangkan perladangan biasanya berupa padi, jagung, kedelai, ubi jalar dan ubi kayu yang menjadi komoditas utama Tulang Bawang.

Di pekarangan penduduk seringkali dijumpai bekas galian tanah yang digunakan untuk membuat batu bata. Meskipun jumlah batu bata yang dihasilkan cukup banyak, namun harga jual batu bata masih cenderung rendah. Di sisi lain, perladangan yang masih mendominasi tanah penduduk selalu diusahakan untuk menanam tanaman komoditas unggulan. Tentu saja masyarakat masih perlu untuk didampingi dalam pengolahan hasil ladang agar dapat bernilai jual tinggi.

Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa Bujuk Agung adalah menjadi buruh harian di perusahaan-perusahaan besar di Tulang Bawang. Akan tetapi buruh harian ini mendapatkan upah yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki keahlian khusus pada saat bekerja di perusahaan besar, akibat dari rendahnya tingkat pendidikan.

Data menunjukkan bahwa rata-rata anak-anak bersekolah hingga jenjang SMP. Setelah itu mereka lebih memilih bekerja untuk membantu orang tua atau menjadi buruh harian. Rendahnya tingkat pendidikan dari generasi komunitas ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi menjadi sebuah siklus yang tidak akan pernah habis.

Kombinasi antara tingkat kemiskinan yang tinggi dan pendidikan yang rendah mengakibatkan banyaknya kasus kriminal. Orang-orang yang tidak bertahan dengan situasi yang ada, lebih cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pencurian. Pencurian yang sering terjadi adalah pencurian getah karet

milik Perusahaan Bumi Waras. Kasus pencurian ini marak terjadi dan pelakunya selalu berakhir di dalam penjara.

Pemetaan Aset Kelompok Petani

Informasi dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Desa Bujuk Agung merupakan desa terkecil di Kecamatan Banjar Margo. Luasnya hanya sekitar 6,16 km². Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya yang tertinggi dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Total jumlah penduduk di desa ini adalah 7 594 jiwa, yang terdiri dari 4.015 laki-laki dan 3.579 perempuan. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk di desa ini cenderung tinggi.

Pada tahun 2018, Desa Bujuk Agung termasuk dalam kategori kampung swadaya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakatnya masih cenderung homogen dan tradisional. Homogenitas yang ditunjukkan dengan minimnya mata pencaharian di luar sektor agraris. Sedangkan karakter tradisionalnya dibentuk dalam masyarakat yang masih kental dengan adat tradisi dan juga minim teknologi.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Bujuk Agung adalah petani. Petani sawah cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan petani ladang. Oleh karena itu, lahan untuk ladang cenderung lebih besar dibandingkan area lain. Selain bertani, mata pencaharian lain di desa ini adalah peternak, buruh harian, pedagang dan lain sebagainya. Jenis-jenis pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang memperoleh pendapatan yang minim.

Tingkat pendidikan penduduk desa ini cenderung hanya mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Terbukti bahwa sebagian besar penduduknya merupakan lulusan SMP. Kondisi ini tidak lepas dari terbatasnya akses masyarakat akibat dari kemiskinan yang dimiliki. Mereka lebih cenderung untuk segera bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun apabila merujuk pada fasilitas yang tersedia, terdapat 2 sekolah dasar (SD), 1 sekolah menengah pertama (SMP) dan 1 sekolah menengah atas (SMA) di Desa Bujuk Agung.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa selama ini para petani mengedepankan pengetahuan tradisional yang dimiliki. Pengetahuan ini menjadi modal utama masyarakat dalam

melaksanakan aktivitas keseharian dan juga menciptakan strategi-strategi bertahan hidup. Situasi ini semakin menunjukkan minimnya aset yang dimiliki oleh kelompok petani korban gusuran PT. BNIL di Tulang Bawang.

Pemetaan Transformasi Sosial Kelompok Petani

Perubahan struktur sosial pada dasarnya akan melahirkan transformasi sosial. Transformasi ini biasanya muncul disebabkan oleh perubahan kebijakan dari pemerintah, perubahan institusional dan lain sebagainya. Adapun rentetan permasalahan yang telah dialami kelompok petani yang tergusur ini tentu menghasilkan berbagai macam transformasi.

Transformasi awal yang terjadi adalah perubahan dari desa adat menjadi desa agraria. Hal ini muncul karena adanya pembukaan lahan oleh pemerintah untuk para transmigran. Hadirnya faktor eksternal ini mampu mengubah nilai dan norma sosial yang berlaku, serta institusi sosial yang ada. Awalnya masyarakat adat hanya bekerja sebagai petani tradisional kemudian mulai mengenal industri.

Secara administratif, Desa Bujuk Agung terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan terbagi lagi menjadi 28 Rukun Tetangga (RT). Selain itu, ada beberapa lembaga formal dan informal yang terbentuk dalam masyarakat Desa Bujuk Agung. Beberapa kelompok ekonomi produktif antara lain, kelompok peternak, kelompok usaha kreatif, kelompok pengajian, kelompok taruna / pemuda dan masih banyak lagi. Kelompok-kelompok ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perubahan kebijakan oleh pemerintah setempat sebenarnya juga terus terjadi. Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut lebih condong pada para pengusaha. Bahkan sempat muncul isu bahwa proses pemilihan kepala daerah juga sudah diatur oleh para pengusaha, dalam hal ini adalah PT. BNIL. Kondisi ini drmskin menyudutkan kelompok marginal seperti masyarakat petani ini.

Usaha-usaha yang muncul sebagai respon dari perubahan kebijakan masih cenderung lemah. Kelompok petani tergusur ini tidak memiliki pendukung yang kuat, sehingga usaha yang dilakukan sebatas pada kemampuan bersama komunitas. Memang sudah banyak NGO ataupun LSM yang membantu kelompok petani ini.

Namun pada akhirnya semua seperti percuma karena petani terus mengalami kekalahan. Institusi-institusi yang membantu kelompok petani juga ikut termarginalkan secara politis dalam kasus ini.

Penetapan Strategi Sosial oleh Kelompok Petani

Kondisi marginal yang dihadapkan pada kelompok petani korban PT BNIL ini perlu ditetapkan strategi yang jitu agar permasalahan segera terselesaikan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan potensi aset yang dimiliki. Masyarakat harus menyadari bahwa segala hal yang dapat diklaim menjadi hak merupakan suatu aset, baik materiil maupun non materiil. Kepemilikan suatu aset memperoleh pengakuan secara formal dan informal. Maksudnya, segala sesuatu yang menjadi hak dari petani akan diakui oleh berbagai pihak. Inilah yang seharusnya menjadi modal untuk menentukan langkah ke depan.

Dalam realitasnya, mayoritas masyarakat tidak memahami peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga mereka juga tidak mengetahui peluang-peluang apa yang bisa dilakukan. Padahal hal ini sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi aset yang dimiliki.

Pada dasarnya, Desa Bujuk Agung merupakan suatu dataran yang kaya akan hasil pertanian. Ini menjadi bukti bahwa sebenarnya sumber daya alam yang dimiliki melimpah. Sayangnya, mayoritas kondisi ekonomi warga masih sangat lemah. Meskipun memiliki sumber daya melimpah, namun masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara optimal.

Strategi lain yang diterapkan agar masyarakat petani dapat tetap mencukupi kebutuhan hidupnya adalah bekerja di luar sektor agraris. Di dalam masyarakat Desa Bujuk Agung terbentuk beberapa kelompok ekonomi produktif. Dalam kelompok-kelompok tersebut masyarakat mulai diarahkan untuk mengembangkan sektor lain. Adapun pengembangan sektor lain yang telah diselenggarakan adalah perdagangan, peternakan, kerajinan, dan industri kreatif. Kelompok yang paling banyak muncul dalam usaha ekonomi produktif ini adalah pedagang. Masyarakat diberikan fasilitas dan terus diadakan pendampingan dari pemerintah daerah agar terus dapat memenuhi kebutuhannya.

Berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif ini mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, usaha-usaha baru ini menghadirkan lapangan pekerjaan dan menyerap banyak pengangguran. Masyarakat usia produktif di desa ini menjadi tersalurkan kreatifitasnya melalui wadah usaha produktif, sehingga mereka tidak bergantung lagi kepada perusahaan-perusahaan besar yang eksplotatif, dan angka pengangguran pun menurun.

Modifikasi Sosial Kelompok Petani

Modifikasi dilakukan dalam bentuk intervensi berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Modifikasi dapat berupa treatment tertentu yang diberlakukan pada suatu masyarakat. Treatment ini akan berbeda apabila kelompok masyarakatnya berbeda. Secara garis besar, modifikasi ini dimaksudkan untuk terus dapat menggali potensi yang dimiliki suatu masyarakat, baik secara materiil maupun nonmateriil.

Penerapan modifikasi terhadap masyarakat petani berupa bentuk intervensi di bidang politik. Bidang ini meliputi proses politik dan kesepakatan atau komitmen masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Proses intervensi ini perlu menghasilkan kepuasan bagi kelompok petani. Untuk itu, perlu ditetapkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan perilaku maupun karakter masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku.

Proses perubahan masyarakat ini memerlukan waktu yang relatif lama. Namun, jika strategi jangka panjang ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka keuntungan dapat diperoleh semua pihak. Peluang investasi dari eksternal masyarakat akan lebih terbuka lebar. Dengan kata lain, intervensi yang dilakukan mengubah perilaku masyarakat perlu untuk melibatkan aktor-aktor yang mempunyai peran tertentu dalam kelompok petani. Kerja sama harus terjalin dengan baik agar aktor-aktor tersebut dapat berintegrasi dengan modifikasi yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, masyarakat juga akan mengubah perilakunya sesuai dengan yang diharapkan.

Ketimpangan yang ada dalam setiap kebijakan maupun peraturan yang disusun oleh pemerintah, menjadi tanda bahwa ada bagian yang hilang dalam sebuah

proses sosial. Mekanisme pembangunan hendaknya melibatkan setiap elemen agar dapat sampai pada tujuan utamanya. Pelaksanaan pembangunan sejatinya perlu berbasis pada kebudayaan masyarakat, sehingga komunitas yang menjadi objek pembangunan dapat bersinergi dan bahkan menjadi subjek ataupun aktor dari proses pembangunan. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi. Kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dapat dikombinasikan dengan konsep *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) agar dapat mengurangi ketimpangan yang muncul dalam kebijakan pemerintah.

Program-program pemberdayaan kelompok atau unit kegiatan di Desa Bujuk Agung dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam proses perubahan sosial yang berbasis pada budaya lokal. Konsep ini kemudian dipadukan dengan prinsip-prinsip dari *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) dalam implementasinya. Proses perubahan yang sedang terjadi dibarengi dengan upaya masyarakat dalam menjalin komunikasi dan kerjasama antara kelompok petani dengan para stakeholders. Para stakeholders ini meliputi pemerintah, pihak swasta, NGO (Non Government Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), bahkan pihak akademis yang biasanya berasal dari perguruan tinggi. Jalinan kerja sama dengan para stakeholders ini akan memberikan dorongan keterbukaan dalam masyarakat, sehingga mereka menerima perubahan yang sedang terjadi.

Masyarakat yang terbuka, akan lebih mudah beradaptasi dan meminimalisir disintegrasi. Apabila integrasi sosial sudah terkondisikan dengan baik, maka akan meningkatkan daya tarik daerah. Situasi yang aman dan nyaman dapat mendorong orang lain untuk tinggal dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Secara jangka panjang, hal ini menjadi suatu potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, sehingga pendapatan meningkat, kerentanan berkurang, jaringan bertambah, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi sumber daya yang ada.

Adaptasi oleh Kelompok Petani

Dalam proses penerapan strategi, pasti dihadapkan dengan banyak hambatan dan permasalahan. Oleh karena itu, perlu dibentuk komunitas yang adaptif dalam

menghadapi berbagai macam hambatan. Masyarakat perlu untuk meningkatkan potensi dari aset yang dimiliki agar hambatan tersebut dapat teratasi.

Proses pembangunan yang berkelanjutan melibatkan berbagai macam variabel pendukung. Variabel tersebut antara lain struktur sosial, kondisi politik dan kekuasaan lokal serta perilaku birokrasi yang ada dalam suatu komunitas. Variabel-variabel tersebut menjadi penting karena dapat meningkatkan kompleksitas harapan yang dimiliki oleh masyarakat yang sering tidak terealisasi. Misalnya, penyelesaian perampasan lahan/tanah jatah transmigrasi dengan PT. BNIL, perhatian pemerintah belum terlihat sehingga mengakibatkan pemilik lahan telah berpuluhan tahun tidak dapat mengusahakan lahannya dan tentunya menyebabkan berkurangnya atau terbatasnya pendapatan/penghasilan mereka. Di sisi lain, kebijakan pemerintah setempat masih tergantung pada perilaku elite politik, yang mengakibatkan keterlambatan dalam tindakan untuk mengelola konflik petani dengan perusahaan. Akibatnya, upaya perbaikan ekonomi petani dan penyelesaian konflik agraria terkonsentrasi hanya pada program yang bersifat “proyek”. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya elemen-elemen pendukung proses pembangunan. Apabila hendak diperbaiki, maka setiap elemen-elemen tersebut juga perlu perombakan agar perubahan dapat berlangsung dengan baik.

SIMPULAN

Problem sosial yang dialami oleh masyarakat petani Desa Bujuk Agung merupakan salah satu wujud rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini dilakukan oleh para pengusaha dengan melibatkan kaum elite politik dan paramiliter. Ketiga komposisi aktor ini mampu mendominasi kelompok petani yang awalnya merupakan kelompok mayoritas. Hal ini terjadi karena pengusaha memiliki kekuatan finansial yang mampu mengontrol kekuasaan pemerintah setempat dan paramiliternya.

Durasi konflik yang cukup panjang melahirkan hegemoni kekuasaan yang tidak terelakan. Masyarakat petani dibuat tidak berdaya dengan keadaan dan mau tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah para elite sosial. Perlawanan terus coba dilakukan, namun selalu diakhiri hasil yang mengecewakan. Apabila ada pihak

yang membantu, semua akan berhenti jika dihadapkan dengan kekuasaan politik. Situasi ini mencerminkan siklus sosial yang tanpa akhir.

Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat petani semakin sulit untuk dicapai karena pola pikir yang mengekang. Masyarakat telah terdoktrin oleh adat istiadat dan tradisi. Ditambah lagi dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi, sehingga masyarakat semakin sulit untuk menemukan terobosan dalam menghadapi permasalahan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan minimnya pengetahuan, kesulitan dalam menerima inovasi, keterbatasan akses dan mudah untuk didominasi pihak lain.

Penyadaran terhadap potensi aset yang dimiliki perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlu untuk menyelenggarakan aktivitas di luar sektor agraris agar pemenuhan kebutuhan hidup tetap dapat tercukupi dengan baik. Aktivitas tersebut antara lain kegiatan ekonomi produktif, peternakan, perdagangan dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya ekonomi kreatif, maka dapat meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto Maksimilianus Gai, dkk, 2020, “*Analysis of Sustainable Livelihood level and its Influence on Community Vulnerability of Surumana Village, Central Sulawesi*”, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Oktober 2020, 4 (3), p. 209-220.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Kecamatan Banjar Margo dalam Angka 2019.
- Hall, Ruth, Marc Edelman, Saturnino M Borrás Jr., Ian Scoones, Ben White, and Wendy Welford. “Resistance, Acquiescence or Incorporation? An Introduction to Land Grabbing and Political Reactions ‘from Below.’” *The Journal of Peasant Studies* 42, no. 3–4 (2015): 467–88. Diakses melalui <https://doi.org/dx.doi.org/10.1080/03066150.2015.1036746>.
- Henry Bernstein, 2015, *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*, Yogyakarta: Insist Press, 2015.

- Mirza Maulana, 2019, “*Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang*”. *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 259-278.
- Petrik Matanasi, 2017, “Petani Tulang Bawang: Kami Diusir dari Tanah Kami”. Diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Diakses melalui <https://tirto.id/petani-tulang-bawang-kami-diusir-dari-tanah-kami-cjLx>
- Saragih, Sebastian, dkk, 2007. *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan: Sustainable Livelihood Framework*, Yogyakarta: Circle Indonesia.
- Sri Wigati dan Achmad Room Fitrianto, 2013, “Pendekatan Sustainable Livelihood Framework dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak melalui Kegiatan Keagamaan: Study Kasus pada Pendampingan Kuliah Kerja Nyata PAR 2012 di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun”, *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No. 2 Tahun 2013, hlm. 283-310.
- Villarian Burhan, 2019, “Analisis Ekonomi Politik Agraria di Indonesia: Studi atas Konflik Agraria STKGB Versus PT. BNIL di Tulang Bawang”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- White, Ben, *Problems in Emprical Analysis of Agrarian Differentiation dalam Agrarian Transformations; Local Processes and the State in Southeast Asia*, (ed.) Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White. Berkeley: University of California Press. 1992.
- White, Ben. “Marx and Chayanov at the margins: understanding agrarian change in Java.” *The Journal of Peasant Studies*, 2018. Diakses melalui <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1419191>.